



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

## **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024 DI DESA RAWANG BINJAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SITI RAMALA**

Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan  
**Email:sitiramala82@gmail.com**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of village fund management in Rawang Binjai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The village funds, allocated by the central government, are intended to accelerate rural development and improve community welfare. However, the implementation still faces various challenges, such as limited understanding of regulations among village officials, insufficient resources, and low community participation.*

*The research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the management of village funds has not been optimal, particularly in terms of transparency, accountability, and the effectiveness of program execution. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of village apparatus and encourage active community involvement in each stage of fund management to promote better governance.*

**Keywords:** *Implementation and Management of village funds*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Dana desa yang berasal dari alokasi pemerintah pusat ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasinya di lapangan masih menemui sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah terimplementasi namun belum berjalan optimal, akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** **Implementasi dan Pengelolaan Dana Desa**



## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan pengelolaan dana bencana alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan ke II atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dana desa, termasuk dana untuk penanggulangan bencana alam di tingkat desa. Meskipun Undang-undang ini secara umum berfokus pada pengelolaan dan penggunaan dana Desa, Pasal yang menyebutkan dana yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana di tingkat Desa yaitu Pasal 28 Ayat (1) tentang perubahan ke II undang-undang nomor 3 tahun 2024 menyebutkan bahwa dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan yang mencakup berbagai hal, termasuk penelolan bencana. Pasal 28 Ayat (2) tentang Perubahan ke II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 salah satu bagian dari pembiayaan dalam Pasal 82 dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Laporan Realisasi APBDes Pemerintahan Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 adalah 95.984.518,00. Dan Program APBDes Desa Rawang Binjai diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana alam, Darurat, dan Mendesak Desa. Pemerintahan Desa memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan dana bencana alam, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, pemerintahan desa diharapkan mampu mengimplementasikan peraturan dengan baik, sehingga dana yang tersedia dapat dikelola secara tepat sasaran, efektif dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan pemerintah desa dalam pengelolaan dana bencana alam di desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bencana di desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana bencana demi kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupten Kuantan Singingi.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Secara Teoritis Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada Implementasi pengelolaan dana Desa Tahun 2024 di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupten Kuantan Singingi.
- 1.4.2 Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data bagi pihak pemerintah dalam implementasi pengelolaan dana Desa Tahun 2024 di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupten Kuantan Singingi.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara**

Menurut Admosudirjo (dalam Kacaribu, 2020:3) administrasi adalah Penyelenggaraan segala sesuatunya guna mencapai tujuan-tujuan yang tertentu. secara harfiah administrasi berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris) atau *administratie* (bahasa Belanda). Istilah administrasi sebagaimana yang dikenal di Indonesia dewasa ini, berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan Belanda. Setelah di telusuri istilah ini berasal dari bahasa Romawi. Istilah administrasi dari bahasa Belanda mempunyai dua arti. Pertama, menunjuk pada kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam pekerjaan pencatatan, korespondensi, perhitungan, kearsipan dan semacamnya yang lazim dilakukan dalam tugas kesekretariatan atau tata usaha suatu organisasi. Kedua, menunjuk pada penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi tersebut. Dengan administrasi manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidupnya yang baik, karena ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses manusia yang dilakukan secara kerja sama. Selanjutnya kriteria pokok Administrasi Negara yaitu: Pertama, rasionalitas. Artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dapat diterima akal sehat yang bersifat universal. Administrasi negara mengedepankan rasionalitas dalam setiap pelaksanaan administrasi negara dapat tercapai sesuai dengan rencana dan lebih berdayaguna.

##### **2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan Publik**

Persoalan pertama yang harus dilakukan dalam formulasi kebijakan publik (*public policy formulation*) adalah merumuskan masalah kebijakan (*policy problem formulation*) itu terdahulu. Islami (1997) menegaskan bahwa hal yang lebih penting agar suatu masalah publik (*public problem*) bisa menjadi masalah kebijakan (*policy problem*) tidak cukup hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah tetapi masyarakat juga perlu memiliki political will untuk memperjuangkan masalah itu menjadi masalah kebijakan dan yang lebih penting lagi hal itu ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan (Joko Widodo, 2007 : 51). Dengan melihat pada apa yang dikemukakan oleh Islami, maka agar masalah publik tadi dapat dipecahkan dengan suatu kebijakan publik, sangat dinuntut adanya perumusan masalah dengan baik dan benar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ackoff (1974) bahwa keberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki ditemukannya pemecahan yang benar atas masalah yang benar.



Kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapatkan pemecahan yang salah terhadap masalah yang benar, (William Dunn, 1998: 91).

### **2.1.3 Teori/Konsep Implementasi**

Implementasi di maksud membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : *implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi (Pressman dan Wildavsky, 1978:21). (dalam Kuhua et al, 2019).

Implementasi dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan Undang-undang berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan. Seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Dampak implementasi memiliki makna bahwa terdapat perubahan yang dapat diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, Undang-undang publik dan keputusan yudisial.

### **2.1.4 Teori/Konsep Organisasi dan Manajemen**

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses dimana manajemen hanya berfokus pada manusia sebagai objek pembinaan, pengembangan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi yang paling penting. Menurut Yuniarsih (2009:1) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengatur peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Menurut Rachmawati (2008:1) manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisien untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Selanjutnya menurut Manullang (2009:98) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairaan kerja semua tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia lebih menarik bertekan pada bagaimana sebuah organisasi memerlukan pegawai sebagai sumber daya yang paling penting bagi organisasi dengan cara memajemenkan pegawai, mengembangkan membina dan melatih agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dibidang tertentu. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. (Rachmawati, 2008:14).



### **2.1.5 Teori/Konsep Desa dan Pemerintahan**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Sutarjo Kartohardikusumo (Luthfia, 2013) desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan pemerintah desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa.

### **2.1.6 Teori/Konsep Organisasi**

Menurut Siagian (dalam Werdiningsih dkk, 2023:2) Organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Menurut Stephen F. Robbins bahwa organisasi merupakan unit yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang lama, beranggotakan dua orang atau 12 lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (dalam Syukran dkk, 2022:98). Prinsip organisasi memiliki tujuan yang jelas yang merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai. Karena tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi maka tujuan tersebut harus dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pegawai dalam organisasi hendaknya mempunyai atasan langsung. Hal ini berarti setiap bawahan hanya dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan sehingga seorang bawahan bertanggung jawab langsung kepada seorang atasannya langsung. Organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip keseimbangan di dalam organisasi dapat dibedakan beberapa macam, misalnya keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, dan kerugian yang diderita oleh suatu unit harus diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit lain. Organisasi berasal dari bahasa Yunani *organon*, yang berarti "Alat". Kata ini termasuk ke dalam bahasa Latin, menjadi *Organizatio* dan kemudian ke bahasa Perancis (abad ke-14) menjadi *organization*. Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.



## 2.2 Kerangka Pemikiran

**Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi).**

**Teori Implementasi Kebijakan**

**Indikator**

- 1. Komunikasi**
  - 2. Sumber daya**
  - 3. Disposisi (sikap pelaksana)**
  - 4. Struktur birokrasi**
- Sumber: George C. Edward III  
(dalam Ag Subarsono, 2009:91)**

**TerImplementasi pengelolaan dana bencana alam di desa Rawang Binjai**

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya ditulis dalam bentuk pernyataan dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris pengumpulan data. Berdasarkan dari perumusan masalah penulis maka hipotesis yang dibuat sebagai berikut : Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan ke II Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Pasal 28 Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi) belum terlaksana dengan baik.

## 2.4 Defenisi Operasional

Menurut Sugiyono (2017:59) definisi operasional adalah penjelasan spesifik mengenai variabel memastikan bahwa variabel tersebut dapat diukur dengan jelas. Definisi ini menjabarkan bagaimana suatu konsep atau variabel dioperasional dalam penelitian, sehingga peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep tersebut. Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dianalisis secara tepat.

## 2.5 Konsep Operasional Penelitian

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Item Penilaian |
|--------|----------|-----------|---------------|----------------|
|--------|----------|-----------|---------------|----------------|





|                  |                     |                    |                                      |                                                                             |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peraturan</b> | <b>Implementasi</b> | Komunikasi         | a. Transmisi<br>b. Kejelasan         | a. Terimplementasi<br>b. Kurang Terimplementasi<br>c. Tidak Terimplementasi |
|                  |                     | Sumber daya        | a. SDM<br>b. Finansial               | a. Terimplementasi<br>b. Kurang Terimplementasi<br>c. Tidak Terimplementasi |
|                  |                     | Disposisi          | a. Watak<br>b. Karakteristik         | a. Terimplementasi<br>b. Kurang Terimplementasi<br>c. Tidak Terimplementasi |
|                  |                     | Struktur birokrasi | a. Fragmentasi<br>b. Pembagian Kerja | a. Terimplementasi<br>b. Kurang Terimplementasi<br>c. Tidak Terimplementasi |

### 3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut. Sehingga dikemukakan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan anatar variabel. (Sugiyono, 2016:7). Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2016:11). Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2016:15).



### **3.2 Informan**

Menurut Moleong (2006:132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

| No     | Unsur Informan   | Jumlah   | Persentase (%) |
|--------|------------------|----------|----------------|
|        |                  | Informan |                |
| 1      | Kepala Desa      | 1        | 100%           |
| 2      | Sekretaris       | 1        | 100%           |
| 3      | Ketua BPD        | 1        | 100%           |
| 4      | Kaur Keuangan    | 1        | 100%           |
| 5      | Tokoh Masyarakat | 5        | 100%           |
| Jumlah |                  | <b>9</b> | <b>100%</b>    |

### **3.3 Sumber Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Menurut (Sugiyono, 2016:80) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Data Primer adalah data yang merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama kali. Jenis data ini disusun dan dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah pengelolaan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. (Sugiyono, 2016:84)

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Impelementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Rawang Binjai Jln. Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. 29561

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Observasi**

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

#### **3.6.2 Wawancara**

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2020:114) wawancara merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.





### **3.6.3 Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seorang/instansi.

### **3.6.4 Triangulasi**

Menurut Sugiyono (2014:125) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam teknik Triangulasipeneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mndapatkan data dari sumber yang sama.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Menurut sugiyono (2019:112) adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk megumpulkan, mengelolah, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau penguji hipotesis. Metode ini dapat bervariasi tergantung pada jenis data yangdigunakan, tujuan penelitian, dan pendekatan yang di ambil, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian, metode analisis berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dimana Menurut Miles dan Huberman (217:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna Sujana (dalam Sujarweni, 2014:5).

#### **3.7.1 Pengumpulan Data**

Penelitian mencatat senua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

#### **3.7.2 Redukasi Data**

Redukasi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Redukasi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

#### **3.7.3 Penyajian Data**

Redukasi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Redukasi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

#### **3.7.4 Pengambilan Keputusan**

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan



untuk mengambil keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Data pokok penelitian ini mengacu pada Pelayanan Publik yang diterima oleh masyarakat.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan indikator tentang Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi penulis menggunakan teori model implementasi dari Edward III dalam analisis ini beberapa kriteria yang digunakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur Birokrasi. Maka dibawah ini akan dipaparkan hasil penelitian yang akan menjelaskan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rawang Binjai Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tiap-tiap indikator dibawah ini.

#### **Indikator Komunikasi**

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan adalah suatu proses penyampaian informasi, perintah, atau instruksi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, sehingga pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Transmisi merujuk pada proses penyampaian informasi atau kebijakan dari pembuat atau pelaksana kebijakan kepada pihak yang menjadi pelaksana teknis maupun sasaran kebijakan. Transmisi yang baik ditandai dengan adanya penyampaian informasi yang langsung, rutin, dan menjangkau semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut

#### **Indikator Sumber Daya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa diketahui dari sisi sumber daya manusia, Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai di nilai sudah baik. Bapak Sarwin menyampaikan bahwa Sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik, meski perlu peningkatan kapasitas terutama dalam bidang administrasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah cukup baik. Hal ini juga di dukung oleh Bapak Dedi Setiadi menyatakan bahwa kami sudah memahami prosedur dasar mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh tokoh masyarakat seperti Bapak Arpison menilai penggunaan sudah jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **Indikator Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Desa Rawang Binjai, dapat disimpulkan bahwa sikap karakteristik pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai telah berjalan dengan baik, meskipun tetap ada beberapa aspek yang perlu di tingkatkan Hal ini juga di dukung oleh bapak Sarwin selaku kepala desa di Desa Rawang Binjai menekankan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan desa adalah transparansi dan keterlibatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa adanya komitmen untuk menjadikan dana desa sebagai sarana pembangunan yang partisipatif.

#### **Indikator Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Rawang Binjai, diketahui bahwa pembagian tugas antar bidang yang terkait dalam Pengelolaan Dana Desa sudah cukup jelas. Bapak Sarwin menjelaskan bahwa



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

kami membagi tugas secara jelas, dan sebagai kepala desa bertanggung jawab mengarahkan program berdasarkan musyawarah desa. Bapak Mayusri menyatakan bahwa sudah membantu kepala desa dalam menyaipkan dokumen berkas administrasi Dana Desa tertin dan sesuai aturan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi dengan baik khususnya Permendesa PD TT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Proses perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping desa, dan masyarakat. Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Rawang Binjai sudah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan program prioritas desa, serta adanya musyawarah desa dalam proses perencanaan,

### **Saran**

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa di Desa Rawang Binjai, disarankan agar pemerintah desa lebih memperkuat transparansi informasi penggunaan dana kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan administrasi keuangan berbasis digital agar pengelolaan dana lebih akurat dan cepat. Pemerintah desa juga diharapkan terus menjaga koordinasi antar perangkat desa dan memperbanyak sosialisasi program kepada seluruh lapisan masyarakat agar partisipasi dan pengawasan masyarakat semakin aktif, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Adamy Marbawi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Aceh. Unimal Pres.
- Anggra Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (2017). *\*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus. (2016). *\*Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edison, dkk. 2016. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S.P. (2017). *\*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawan, R & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Kadarisman, 2016. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: PT.Gravindo Persada
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1984). *\*Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kessa, W. (2011). *Perencanaan pembangunan desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. (2015). *\*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kuncoro, M. (2011). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lijak Poltak Sinambela, 2006. *Pengertian Partisipasi*, Bandung : Gramedia



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurlita, S. (2023). Efektivitas Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa Di Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Tanggerang

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Simbolon, 2021, Kebijakan pemerintah daerah

Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2018). *\*Perilaku Organisasi*. Edisi ke-16. Jakarta:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework

Widjaja. 2010. *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.

#### **Jurnal**

Ahmad, R. 2018. "Analisis Pengaruh X terhadap Y." *Jurnal Penelitian Sosial, Jakarta*: Penerbit Universitas A.

Budi, S. 2019. "Studi Kasus Z dalam Konteks A." *Jurnal Ilmu Ekonomi, Bandung*: Penerbit Universitas B.

Citra, L. 2020. "Perkembangan Teknologi dan Dampaknya." *Jurnal Teknologi Informasi, Surabaya*: Penerbit Universitas C.

Dwi, M. 2021. "Implementasi Metode Baru dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan, Yogyakarta*: Penerbit Universitas D.

Eko, T. 2022. "Tantangan dan Peluang di Era Digital." *Jurnal Bisnis Modern, Medan*: Penerbit Universitas E.

Fajar, H. 2023. "Inovasi dalam Manajemen Sumber Daya." *Jurnal Manajemen, Semarang*: Penerbit Universitas F.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Gita, P. 2021. "Pengaruh Lingkungan terhadap Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Palembang*: Penerbit Universitas G.
- Hani, R. 2020. "Peran Media Sosial dalam Komunikasi." *Jurnal Komunikasi, Makassar*: Penerbit Universitas H.
- Iwan, J. 2019. "Strategi Pemasaran di Era Digital." *Jurnal Pemasaran, Bali*: Penerbit Universitas I.
- Joko, S. 2022. "Analisis Data Besar dalam Bisnis." *Jurnal Data dan Analisis, Jakarta*: Penerbit Universitas J.
- Putra, R. A., & Sari, D. P. (2020). "Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten ." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123-135
- Sari, N. W. (2021). "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *"Jurnal Ilmu Pemerintahan"* 13(1), 45-59